

BUPATI TERIMA SERTIFIKAT BUNDA PAUD

Sleman Sukses Kawal Gerakan Transisi PAUD ke SD

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini menerima apresiasi Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Mercure Hotel Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Rabu (6/11). Hadir pada acara tersebut Bunda PAUD Indonesia Iriana Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Apresiasi ini diberikan atas kontribusi serta peran Bupati Sleman dalam mengawal Gerakan Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Edaran No. 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari seko-

lah jenjang PAUD menuju Sekolah Dasar. Tujuannya yakni untuk memenuhi hak-hak anak guna mendapatkan kemampuan fondasinya.

Menurut Bupati, Pemkab Sleman melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mengadvokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Salah satunya dengan meniadakan tes Calistung (Baca, Tulis, Hitung) sebagai syarat masuk ke jenjang SD. Dengan begitu diharapkan masa transisi dari PAUD ke SD dapat dilalui anak dengan proses yang lebih menyenangkan.

"Kita juga sudah meninjau beberapa SD di

Kabupaten untuk mengawal Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Upaya ini agar gerakan transisi berjalan dengan baik," ujar Bupati usai menerima apresiasi.

Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa proses belajar secara menyenangkan merupakan esensi dari program Merdeka Belajar.

Dalam hal ini, Kemendikbudristek memfokuskan pada PAUD yang memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. (Has)-f



KR-Istimewa

Bupati Kustini memperlihatkan sertifikat sebagai apresiasi Bunda PAUD.

BRI BO Sleman Tanam 1.210 Bibit Tanaman



KR-Saifullah Nur Ichwan

Yudha Kencana Saputra menanam pohon dalam program BRI Menanam.

SLEMAN (KR) - Bank BRI Branch Office (BO) Sleman menanam 1.210 bibit tanaman di 11 kalurahan di Kabupaten Sleman. Penghijauan ini sebagai wujud komitmen BRI dalam rangka mengurangi emisi karbon.

Pemimpin BRI BO Sleman Yudha Kencana Saputra menjelaskan, program BRI menanam ini sudah berjalan sejak 2022. Hal itu sebagai wujud komitmen BRI dalam menerapkan 'Environment, Social & Governance' (ESG). "Program BRI menanam ini sebagai wujud komitmen kami dalam mengurangi emisi karbon. Dan ini akan dilaksanakan setiap tahun," jelasnya dalam acara BRI Menanam di Kampung Mahoni Tanen Hargobinangun Pakem, Rabu (8/11).

Menurut Yudha, program BRI menanam ini dilaksanakan di 11 kalurahan di Kabupaten Sleman oleh 10 unit kerja yakni di Trihanggo Gamping, Sidoluhur Godean, Pandowohario Sleman, Wonokerto Turi Sleman, Purwobinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Umbulharjo Cangkringan, Sumberarum Moyudan, Sidokarto Godean, Sardonoarjo Ngaglik dan Condongcatur Depok. Setiap titik ada 110 bibit tanaman produktif berupa buah-buahan.

"Tanaman berupa bibit mangga, alpukat dan durian ini merupakan aspirasi dari masyarakat untuk disesuaikan dengan kondisi tanah disini. Monitoring dan evaluasi penanaman bibit ini dilakukan secara bertahap oleh mantri saat melakukan pembinaan on site dan menjadi bagian dalam aktifitas 'Pojok Mantri Desa'. Harapannya tanaman ini bisa bermanfaat bagi masyarakat," terangnya. (Sni)-f

Vrije Universiteit Amsterdam Kunjungi Al Azhar

SLEMAN (KR) - Al Azhar Yogyakarta, mendapat kunjungan istimewa dari Medical Students Vrije Universiteit Amsterdam Belanda. Delegasi yang dikoordinir Inez Yvonne Trajanovic, tiba di Al Azhar Yogyakarta untuk silaturahmi, sharing dan rencana jangka panjang menjalin dan membuka peluang untuk kerja sama di bidang pendidikan.

Inez mengapresiasi keberagaman budaya dan nilai-nilai keagamaan yang diterapkan di Al Azhar Yogyakarta karena kunjungan tersebut bertepatan dengan Hari Kamis Pahing dimana para murid menggunakan pakaian adat Jawa. "Kami melihat potensi besar untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antara Vrije Universiteit Amsterdam dan Al Azhar Yogyakarta," ujarnya.

Selain Medical Students Vrije Universiteit Amsterdam yang berjumlah 22 orang, kegiatan ini juga dihadiri beberapa wakil bidang sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta. Di antaranya Wakabid Kesekretariatan Drs Bashori Muhammad MM, Wakabid Keagamaan Zulfi Fuad Tamyiz SE dan Kepala SMP IA 26 Lyut Ayudya MPd, serta Kepala SMA IA 9 Yogyakarta Agung Widiyantoro MPd.

Lyut Ayudya MPd mewakili civitas Al Azhar Yogyakarta menyatakan harapannya terhadap kerja sama yang lebih erat antara kedua institusi. "Kerja sama ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pengembangan akademis, tetapi juga akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan murid Al Azhar Yogyakarta," katanya, Rabu (8/11). (Dev)-f



KR-Istimewa

Siswa Al Azhar Yogya bersama medical student Vrije Universiteit Amsterdam.



Tertib Ukur, Bentuk Perlindungan Sleman bagi Konsumen

JAMAK kita mendengar pemberitaan tentang tindak kecurangan pedagang atau petugas yang mengurangi takaran timbangan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dalam jual beli menggunakan alat ukur (timbangan) kecenderungannya tidak sesuai dengan beratnya. Kecurangan alat ukur kerap terjadi di tempat transaksi yang menggunakan alat ukur seperti SPBU, pasar tradisional dan berbagai tempat transaksi lain.

Fenomena ini membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menghindarkan kerugian konsumen dari tindak pidana metrology legal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi adalah dengan melaksanakan tera ulang. Ketugasan ini rutin dilakukan UPTD Pelayanan Metrologi Legal Disperindag Sleman. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UPTD ini bertugas melakukan pelayanan tera ulang, mengawasi dan mengevaluasi alat UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan perengkapannya).

Mungkin belum banyak masyarakat yang tahu untuk memastikan ketepatan ukuran dalam tiap transaksi jual beli, perlu dilakukan tera ulang berkala. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, pelayanan kemetrolgion dilakukan rutin oleh UPTD Metrologi di antaranya di SPBU, SPBE, tangki ukur mobil, ekspedisi, jasa transportasi (taxi), pedagang pasar, serta fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas dan apotek.

Pada tahun 2022, UPTD Pelayanan Metrologi Legal Sleman telah melakukan tera ulang di 28 pasar tradisional, 10 pasar modern, 2 RSUD, 4 RS, 1 puskesmas, 15 apotek, 4 SPBE, 49 SPBU, 15 Pertashop, 11 jembatan timbang dan 84

Bupati Kustini



meter kadar air dengan total 19.737 UTPP yang telah ditera ulang. Selain itu, UPTD Metrologi juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada 800 pedagang.

Giat ini menjadi bukti kepedulian Sleman terhadap perlindungan konsumen. Upaya UPTD Metrologi Legal Sleman tersebut diapresiasi di tingkat nasional, antara lain Predikat Daerah Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 dan 2022. UPTD Metrologi Legal juga berhasil meraih nilai 'A' dalam Surveillance UML di Indonesia oleh Direktorat Metrologi Kemendag dengan hasil penilaian 'Tanpa Temuan'.

Tahun ini UPTD Metrologi Legal menargetkan Sleman sebagai daerah tertib ukur dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan dan tera ulang kepada masyarakat khususnya pengguna UTPP. Untuk mencapai misi tersebut, tahun ini UPTD Metrologi Legal meluncurkan inovasi untuk mendukung pelayanan kemetrolgion yang lebih baik, mudah dan transparan. Di antaranya melalui aplikasi SIMPELOMAS (Sistem Informasi Pelayanan Metrologi Kabupaten Sleman), penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Pembaharuan SOP Pelayanan yang memudahkan serta memberikan transparansi dalam pelayanan.

Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh warga Sleman menjadi Masyarakat Melek Metrologi (3M). Konsumen harus jeli dan teliti memastikan alat ukur yang digunakan telah melalui proses tera ulang yang dibuktikan dengan pembubuhan cap tanda tera 'A'. Sebaliknya saya menegaskan kepada pedagang untuk jangan mencoba-coba mengurangi takaran, meteran maupun timbangan karena tindakan tersebut tentunya akan diproses secara hukum. □ -f



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Memastikan Pemilu Berjalan Luber Jurdil



KR-Saifullah Nur Ichwan

Hasdo Karyantoro SIP

SLEMAN (KR) - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Situasi politik akan semakin panas. Komisi A DPRD Sleman meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan Luber Jurdil yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian bagi peserta Pemilu supaya tidak melakukan 'black campaign'

atau menyebar hoax yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Hasdo Karyantoro SIP mengatakan, KPU dan Bawaslu merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mengingat Pemilu 2024 merupakan hajatan besar, KPU dan Bawaslu harus bisa memastikan Pemilu berjalan luber jurdil. "Kami minta Pemilu 2024 bisa terwujud Pemilu yang luber jurdil. Tidak boleh ada kecurangan atau permainan yang merusak citra pesta demokrasi lima tahunan ini," katanya, Rabu (8/11).

Menurut Hasdo, Pemilu sekarang ini sudah modern. Bahkan dengan penggunaan teknologi, tentu Pemilu akan semakin canggih. Namun penggunaan teknologi juga mempunyai risiko karena teknologi itu juga buatan manusia. "Memang dengan

adanya teknologi bisa semakin canggih. Tapi itu buatan manusia lo. Kredibilitas KPU disini diuji, bagaimana KPU bisa jujur dan adil dalam penggunaan IT dalam Pemilu," ujar anggota dewan dari Dapil Gamping-Mlati ini.

Hal yang tak kalah penting, lanjut Hasdo, dalam pemilu nanti sudah saatnya tidak perlu lagi ada politisasi

birokrasi yang penyalahgunaan kekuasaan. Di antaranya tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau daerah untuk kepentingan pemenangan pemilu.

"Kami minta secara tegas, politisasi birokrasi tidak boleh. Wilayah yang abu-abu harus disingkirkan seperti penggunaan fasilitas yang melekat pada jabatan, baik itu pemimpin daerah atau

pejabat lainnya," tegas politisi dari PKS ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Suryana AMdKes menambahkan, Komisi A DPRD Sleman meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa harus netral dalam Pemilu 2024. Supaya Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan lancar aman, jujur dan adil. "ASN dan pe-

rangkat desa harus netral dalam Pemilu 2024. Tidak boleh berpihak atau justru ikut kampanye," tambah Ketua Fraksi Golkar ini.

Kemudian pihaknya mendorong kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Khususnya pengawasan saat penghitungan suara dari hulu hingga hilir untukantisipasi kecurangan. "Penghitungan suara merupakan momen yang sangat krusial. Jadi perlu pengawasan yang ketat supaya tidak ada kecurangan atau jual beli suara," pinta anggota dewan dari Dapil Mlati-Gamping ini.

Selanjutnya, peserta pemilu baik itu partai maupun calon legislatif supaya tidak melakukan 'black campaign' maupun menyebar hoax untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kemudian masyarakat juga jangan mudah terprovokasi atau



KR-Saifullah Nur Ichwan

Suryana AMdKes

terpancing sesuatu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta kerukunan warga.

"Ini pesta rakyat, jadi rakyat harus dibuat gembira. Tidak boleh ada rasa kebencian, permusuhan, keributan dan lainnya. Makanya tidak boleh 'black campaign' dan hoax. Tapi buatlah pemilu yang asyik dan gembira," tutup anggota dewan yang juga berprofesi bongsu ini. (Sni) -f



KR-Istimewa

Komisi A saat rapat dengan Bawaslu Kabupaten Sleman.